

## BAB II

### DESKRIPSI WILAYAH DAN PROFIL

#### DPD II PARTAI GOLKAR KAB. INDRAMAYU

##### A. Deskripsi Wilayah

###### 1. Sejarah Lahirnya Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Jawa-Barat, dengan luas wilayah 204.011 hektar. Kabupaten Indramayu terdiri dari 24 Kecamatan 8 Kelurahan dan 302 Desa.

###### a. Sejarah Perkembangan

###### 1) Pra Tahun 1527

Sejarah Putra Tulungagung Gagak Singalodra yang mempunyai garis keturunan Majapahit dan Pajajaran, dalam tapa bratanya dikaki Gunung Sumbing mendapat wangsit sebagai berikut :

“Hai Wiralodra apabila engkau ingin berbahagia berketurunan dikemudian hari pergilah, kearah matahari dan carilah lembah sungai Cimanuk. Manakala telah tiba disana berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pendukuhan dan menetaplah disana, kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur serta tujuh turunanmu akan memerintah disana.”

Raden Wiralodra ditemani Ki Tinggil dan berbekal senjata cakra undaksana. Tokoh-tokoh lain dengan pendiri pedukuhan dimaksud adalah Nyi Endang Dharma yang cantik dan sakti. Aria Kemuning putra Ki Gede Lurah Agung yang diangkat putra oleh putri Ong Tien istri Sunan Gunung Jati. Ki Buyut Sidum atau Kidang Pananjang seorang pahlawan Punakawan Sri Paduka dari Pajajaran, pangeran guru, seorang pangeran

yang mengajarkan kanuragan dengan 24 muridnya. Pedukuhan tersebut berkembang dan diberi nama "Dharma Ayu" oleh Raden Aryawilalodra yang diambil dari nama seorang wanita yang dikagumi karena kecantikan dan kesaktiannya "Nyi Endang Darma" serta dapat diartikan "kewajiban yang utama" atau "tugas suci", yang kemudian berubah menjadi "INDRAMAYU", setelah terbebas dari kekuasaan Pajajaran pada tahun 1527, diproklamkan berdirinya oleh Raden Arya Wiralodra pada hari Jum'at 1527. titimangsa tersebut resmi menjadi hari resmi Indramayu.

## 2) Priode Tahun 1527-1990

Setelah tahun 1527, daerah Indramayu terbagi dalam tiga Propinsi meliputi :

- a. Propinsi Singaparna, meliputi sebelah timur sampai sungai kamal.
- b. Propinsi Rajagaluh, meliputi daerah tengah sampai Jatitujuh.
- c. Propinsi Sumedang, meliputi bagian barat sampai kadanghaur.

Pada masa itu berada dalam kekuasaan kerajaan Demak. Pada tahun 1546 menjadi bagian Kesultanan Cirebon. Tahun 1615 sebelah timur dan bagian baratnya sungai cimanuk menjadi bagian kesultanan Cirebon dan bagian timurnya termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Mataram. Tahun 1681, mulai dikuasai oleh kompeni. Zaman pemerintahan Danles (1806-1811) daerah sebelah bagian barat sungai Cimanuk dimasukan dalam Prefektur Karawang dan sebelah Timurnya masuk Prefektur Cirebon Utara. Pada zaman kompeni menjadi ajang

masuk pertempuran segitiga antara kompeni, Mataram dan Banten. Tahun 1706, daerah Indramayu jatuh dalam kekuasaan kompeni Belanda seluruhnya seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Indramayu mempunyai perjalanan yang sama berada dalam kekuasaan penjajah.

## 2. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Indramayu terletak pada  $107^{\circ} 52' - 108^{\circ} 36'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 15' - 6^{\circ} 40'$  Lintang Selatan. Batas sebelah barat Kabupaten Subang, sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa, sebelah selatan Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Cirebon.

### a. Topografi

keadaan topografi Kabupaten Indramayu dengan ketinggian 0-100 meter diatas permukaan laut, sebagian besar atau 98,70 persen berada berada pada ketinggian 0-3 meter diatas permukaan laut. Penyebaran ketinggian Kabupaten Indramayu secara lebih rinci adalah ketinggian 0-3 meter diatas permukaan laut berada dibagian barat daya dan utara, ketinggian 3-25 meter diatas permukaan laut berada dibagian tengah dan ketinggian 25-100 meter diatas permukaan laut berada sebagian kecil dibagian selatan.

### b. Iklim dan Curah hujan

kabupaten Indramayu suhu harian berkisar antara  $26^{\circ} - 27^{\circ} C$  dengan suhu harian tertinggi  $30^{\circ} C$  dan terendah  $18^{\circ} C$ . Kelembaban udara berkisar antara 70-80 persen. Curah hujan rata-rata tahunan 1.428,45 mm per tahun dengan jumlah hujan 75 hari.

Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, wilayah ini termasuk pada type D (iklim sedang). Angin barat dan angin timur bertiup secara bergantian kurang lebih setiap 6 bulan, angin barat bertiup bulan Desember sampai dengan April dan angin Timur pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Kecamatan yang mengalami curah hujan yang tinggi antara lain Kecamatan Anjatan, Cikedung dan Kecamatan Haurgelis secara berturut-turut adalah 2.167 mm/tahun, 1.869 mm/tahun dan 1.865 mm/tahun. Sedangkan hari hujan terbanyak adalah Kecamatan Cikedung dan Gabus wetan yaitu sebanyak 94 hari hujan per tahun.

#### c. Hidrologi

Kabupaten Indramayu tidak memiliki sumber air sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selama ini kebutuhan air di Kabupaten Indramayu bersumber dari bendungan sungai cimanuk direntang melalui saluran irigasi Cipelang dan Sindupraja, saluran Jatiluhur, waduk Cipancuh, saluran irigasi Lebiah serta saluran irigasi Cibolerang, Cipondoh dan Situbolang.

Ditinjau dari kemampuan lahan hidrologi, maka Kabupaten Indramayu tergolong mempunyai kemampuan lahan mata air, kemampuan lahan mata air dangkal dan kemampuan lahan air daerah pantai. Daerah yang mempunyai kemampuan lahan mata air adalah wilayah bagian selatan yaitu Kecamatan Haurgelis dan Kecamatan Cikedung. Sebagian besar wilayah mempunyai zona lahan air tanah bebas.

#### d. Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 1.569.468 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 805.191 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 791.277 jiwa dengan sex ratio sebesar 101,76. Keadaan ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 8.213 jiwa bila dibandingkan pada tahun 2002 yang tercatat sebanyak 1.588.255 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indramayu tahun 2003 sebesar 0,52 persen. Pada tahun 2003 yang mempunyai penduduk paling banyak adalah Kecamatan Haurgelis sebanyak 134.435 orang (8,42%), Kecamatan Indramayu 104.136 orang (6,52 %) dan Kecamatan Karangampel 103.306 orang (6,47 %). Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Balongan 21.472 orang (1,34%), Kecamatan Bongas 43.533 orang (2,73 %) dan Kecamatan Lelea 26.214 orang (2,48 %), Kecamatan Centigi 22.335 orang (1,40%), Kecamatan Arahau 31.247 orang (1,96 %).

- Laju pertumbuhan kesempatan kerja (LPKK) : 6,30%.
- Laju perkembangan penduduk : 1,30 %.
- Laju pertumbuhan pencari kerja : 16,10 %
- Jumlah desa tertinggal : 110 desa.

#### Jumlah Penduduk :

- Pra Keluarga Sejahtera : 114,862 Kepala Keluarga
- Keluarga Sejahtera I : 67,154 Kepala Keluarga
- Keluarga Sejahtera II : 80,250 Kepala Keluarga

- Keluarga Sejahtera III 48,703 Kepala Keluarga
- Keluarga Sejahtera III+ : 14,673 Kepala Keluarga

### 3. Kondisi Sosial, Ekonomi Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten yang cukup kaya di Propinsi Jawa-Barat. Disamping wilayahnya yang cukup strategis yaitu dilewati jalur utama Pantai Utara (Pantura) yang membentang dari Kecamatan Karangampel dan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon sampai Kecamatan Anjatan yang berbatasan dengan Kabupaten Subang sepanjang kurang lebih dari 100 kilometer. Indramayu dikenal juga sebagai salah satu lumbung padi Jawa-Barat, bahkan Indonesia. Mangga banyak dihasilkan didaerah ini, buah mangga yang bersal dari Indramayu terkenal dengan rasanya yang manis. Selain itu di Indramayu juga terdapat wilayah perkebunan. Selain hutan jati, kebun mangga dan tebu, juga memiliki perkebunan kayu putih yang terletak di Kecamatan Cikeding. Sedangkan dari sektor perikanan, daerah ini merupakan penghasil ikan laut dan udang serta industri kerupuk udang dan terasi.

Minyak dan gas sudah mulai dieksplorasi sejak tahun 1970 yaitu didaerah Jatibarang, Kadanghaur serta lepas pantai daerah Balongan. Kemudian pada tahun 1980 dibuat terminal penyaluran yang dilanjutkan dengan pembangunan kilang pada tahun 1990, dan mulai beroperasi pada tahun 1994. saat ini minyak yang dihasilkan adalah 125.000 BPSD (*Barrel per Stream day*) yang dapat untuk memenuhi kebutuhan minyak Propinsi

DKI Jakarta dan eks Karisidenan Cirebon (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor minyak dan gas cukup besar. Sebagai contoh pada tahun 1996 Pendapatan asli Daerah (PAD) Indramayu dari subsektor minyak dan gas mencapai 53,82 persen. Kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 55,16 persen. Sedangkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari eksplorasi minyak dan gas pada tahun 1996 sebesar 8,3 milyar rupiah, sedangkan tahun 2003 meningkat menjadi 11,2 milyar rupiah. Sementara itu jumlah sumur minyak sebanyak 77 buah sedangkan sumur gas sebanyak 44 buah (kompas, 4 Januari 2003).

#### 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu Berdasarkan Agama

Mayoritas penduduk Indramayu memeluk agama Islam, yaitu sekitar 99,70 persen dari jumlah penduduk, kemudian diikuti Kristen Protestan 0,15 persen, Katholik 0,13 persen, Hindu dan Budha masing-masing 0,01 persen. Data penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu Menurut Agama**  
**Tahun 2004**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemeluk Agama				
			Islam	Krist/Protes	Katholik	Hindu	Budha
1.	Indramayu	103.746	102.367	181	1.131	7	60
2.	Sindang	79.862	79.838	12	12	-	-
3.	Lohbener	83.135	83.115	20	-	-	-
4.	Karangampel	102.836	102.784	38	-	-	14
5.	Juntiunyat	81.218	81.158	60	-	-	-
6.	Krangkeng	61.600	61.600	-	-	-	-
7.	Jatibarang	68.290	68.236	30	24	-	-
8.	Sliyeg	66.815	66.782	33	-	-	-
9.	Kertasemaya	85.616	85.562	54	-	-	-
10.	Bangodua	59.380	59.361	17	-	2	-
11.	Widsari	52.844	52.834	4	6	-	-
12.	Losarang	51.494	51.174	168	152	-	-
13.	Lelea	46.058	45.916	110	32	-	-
14.	Cikedung	87.136	87.113	11	12	-	-
15.	Kandanghaur	80.192	79.497	71	610	9	5
16.	Gabuswetan	51.778	51.378	343	57	-	-
17.	Anjatan	85.445	85.294	145	-	-	6
18.	Haurgeulis	133.994	132.860	932	50	141	11

19.	Bongas	43.513	43.482	12	16	-	3
20.	Sukra	86.591	86.456	129	-	2	4
21.	Kroya	56.657	56.623	34	-	-	-
22.	Balongan	21.830	21.782	-	48	-	-
Jumlah		1.590.030	1.585.212	2.404	2.150	161	103
Prosentase			99.70	0.15	0.14	0.01	0.01

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Indramayu 2004

## B. Profil DPD II Partai Golkar Kabupaten Indramayu

### 1. Paradigma Baru Partai Golkar

Musyawarah Nasional (MUNAS) luar biasa Golongan Karya yang dilaksanakan pada bulan Juli 1998 sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto, adalah pencerminan dari langkah awal Golkar mengembangkan orientasi baru yang komitmen pada "semangat reformasi" yang berintikan keadilan, demokratisas, dan transparansi. Dengan kata lain melalui Munas luar biasa Golkar telah meninggalkan "paradigma lama" dan tampil dengan misi, visi dan platform perjuangan yang baru atau yang disebut dengan Paradigma Baru Partai Golkar.

Dari hasil Munas luar biasa telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Golkar yang baru menegaskan perubahan nama menjadi Partai Golongan Karya atau disingkat partai Golkar. Perubahan nama tersebut disamping beberapa perubahan mendasar lainnya dilakukan untuk mengantisipasi perubahan Undang-

undang bidang politik sekaligus mengembangkan semangat kesamaan hak (*egaliter*) dengan sesama partai politik lainnya.

Walaupun Golkar telah mengembangkan paradigma baru, namun partai yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1960 tetap dengan jati diri yang tetap dipertahankan sebagaimana tertuang dalam ikrar dan doktrin partai Golkar. Jadi diri tetap diaktualisasikan dengan semangat baru dalam lingkungan strategis yang berubah.

#### a. Reformasi Internal Golongan Karya

Melalui Munas luar biasa yang didorong oleh semangat reformasi dari kader-kader Golkar, telah dilakukan perubahan-perubahan mendasar. Perubahan mendasar yang menunjukkan Golkar membedakan orientasi dan semangat dengan paradigma baru diwujudkan antara lain.

1. Sebagai manifestasi dari komitmen Golkar baru pada semangat demokratisasi, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Golkar telah melakukan ketua umum secara sangat demokratis dengan pemungutan suara secara langsung dalam Munas luar biasa Golkar pada bulan Juli 1998 yang lalu. Pola yang sama terus dikembangkan dalam Musyawarah Daerah (Musyda) tingkat I, Musyawarah Daerah (Musyda) tingkat II, Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah desa/kelurahan.
2. Pemutusan hubungan dengan sistem kekuasaan lama (*disconnection*).

Sebagai mana tercermin dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar hasil munas luar biasa, telah dilakukan perubahan

mendasar dengan penghilangan penyebut "Orde Baru". Hal ini dilakukan sebagai pencerminan dari tekad Golkar baru untuk menangkap semangat reformasi dengan melakukan reorientasi dan memutuskan hubungan dengan masa lalu dalam arti memutuskan hubungan dengan sistem kekuasaan lama yang terpusat pada orang-seorang, berkesinambungan terhadap yang terjadi di masa lalu tersebut. Pemutusan hubungan ini tidaklah menggeser jati diri Golkar yang hakiki sebagaimana terkandung dalam ikrar dan doktrin perjuangan Golkar yang tetap dipertahankan dan diaktualisasikan sesuai dengan tuntutan zaman.

### 3. Penghapusan Lembaga Dewan Pembina

Pemantapan kemandirian organisasi oleh Munas luar biasa antara lain dihapuskannya kelembagaan dewan pembina. Penghapusan kelembagaan dewan pembina dimaksudkan untuk menghapus intitusi yang menyebabkan ketidakmandirian organisasi selama ini. Eksistensi dewan pembina yang menjadi begitu ekseif dengan kekuasaan yang sangat dominan ditiadakan bersama-sama dengan penghapusan dewan pertimbangan dan dewan panasehat. Selanjutnya pada setiap struktur kepengurusan hanya ada penasehat yang terdiri dari beberapa tokoh senior yang dibentuk dan ditetapkan oleh jenjang kepengurusan yang bersangkutan.

#### 4. Penghapusan Mekanisme Tiga jalur

Untuk pemantapan kemandirian organisasi yang dilakukan dengan dihapuskannya pelembagaan secara formal apa yang disebut “kepemimpinan atau mekanisme tiga jalur” keluarga besar Golkar yaitu jalur A (abri dan keluarga besar abri), jalur B (birokrasi atau pemerintahan), dan jalur G (Golkar itu sendiri). Dengan demikian pengambilan keputusan organisasi sepenuhnya bersifat mandiri dilaksanakan secara demokratis.

#### 5. Perwujudan Semangat Anti KKN

Sejalan dengan semangat reformasi, Golkar telah mengambil langkah-langkah untuk pemilihan kredibilitas organisasi dengan melakukan tindakan pada kader dan anggota yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) antara lain dengan melakukan recalling.

#### b. Misi dan Visi Partai Golkar

Misi Golkar baru adalah misi yang dikembangkan perwujudan fungsi selaku Partai Politik, yaitu :

1. Mempertegas sikap untuk menyerap, memadukan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
2. Melakukan Rekrutmen kader yang berkualitas dan mendapat dukungan rakyat untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik dilembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan dan pemerintahan. Jabatan politik tersebut diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

3. Melakukan pendidikan politik bagi rakyat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui komunikasi dan sosialisasi politik.

Sedangkan untuk Visi Partai Golkar adalah :

1. Golkar adalah Partai Terbuka (Inklusif)

Sebagai partai terbuka Golkar senantiasa mengembangkan kemajemukan yang berwawasan inklusif, dalam pengertian pengembangan keterbukaan yang kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat yang berorientasi pada kemajuan dan kepentingan bangsa. Visi sebagai partai terbuka ini merupakan jati diri Golkar yang bersifat permanen dan akan tetap dipertahankan sampai kapanpun, karena visi ini dilandasi oleh wawasan kebangsaan, non diskriminasi dan kesadaran yang penuh terhadap realitas kemajemukan bangsa Indonesia.

2. Golkar Sebagai Partai Mandiri (independent)

Sebagai partai yang mandiri Golkar senantiasa harus mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijaksanaan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan dari pihak manapun. Secara struktural Golkar baru tidak lagi mengenal "mekanisme tiga jalur" dan dewan pembina/dewan pertimbangan/dewan penasihat seperti dimasa lalu.

3. Golkar adalah Partai Demokratis

Sebagai partai yang demokratis Golkar senantiasa mengembangkan kepeloporan untuk tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan

terbuka (transparan). Secara intern musyawarah-musyawarah partai mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan dan desa harus mampu mengambil keputusan atas dasar kedaulatan anggota (*bottom up*). Sedangkan dalam tatanan kehidupan kenegaraan, Golkar senantiasa mengupayakan keputusan politik yang dilandasi atas dasar kedaulatan rakyat dan kepentingan nasional.

#### 4. Sebagai partai Moderat

Sebagai partai yang moderat Golkar senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak berorientasi kekiri atau kekanan secara ekstrim. Dengan demikian Golkar baru mengembangkan sikap non sektarian. Visi politik moderat adalah visi yang dianggap paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

#### 5. Sebagai Partai yang Solid

Sebagai partai yang solid Golkar secara utuh dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan segenap potensi dimilikinya secara sinergis. Dengan visi ini, Golkar melakukan konsolidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih. Hubungan dengan orsosmasinal dikembangkan dengan pendekatan fungsional yang saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan setara.

#### 6. Sebagai Partai yang Mengakar

Sebagai partai yang mengakar Golkar senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi (*meritocratic system*) atau lengkapnya berdasarkan prestasi, dedikasi, disiplin loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

#### 7. Golkar Adalah Partai yang Responsif

Sebagai partai yang responsif Golkar senantiasa peka, dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkannya menjadi keputusan politik yang bersifat publik dan menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang, suku, etnis, agama, bahasa, aliran, dan kebudayaan.

#### c. Platform Partai Golkar

Platform adalah landasan pijak dari arah dan kemana arah perjuangan partai Golkar adapun platform partai Golkar adalah sebagai berikut :

1. Golkar berpijak pada landasan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pemahaman ini Golkar menolak gagasan negara federal dan setuju dilakukannya pengurangan terhadap kecenderungan sentralisme dalam pengelolaan negara dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah.

2. Golkar berwawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandangan yang mengatasi golongan dan kelompok baik atas dasar suku, etnis, agama, bahasa, aliran, adat maupun kebudayaan. Dengan wawasan ini, maka semua potensi bangsa mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal, sehingga kelompok minoritas sekalipun akan merasa seperti dirumahnya sendiri. Potensi-potensi ini bahkan kemudian harus disimpan sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar.
3. Golkar adalah partai yang majemuk (prulalis). Golkar adalah partai yang menampung kemajemukan bangsa Indonesia. Bagi Golkar kemajemukan adalah anugerah Tuhan yang justru membentuk mezoik ke-Indonesiaan yang sangat indah dan mempesona yang dalam semboyan "Bhenika Tunggal Ika". Komitmen ini akan dipertahankan oleh Golkar sepanjang masa, karena komitmen pada identitas ke-Indonesiaan. Dengan demikian maka Golkar tidak sependapat dengan pembelahan masyarakat (*social fragmentarization*) berdasarkan sifat primordial dan sektarian. Dengan sikap yang non aliran dan non sectarian, Golkar mengembangkan perspektif fungsi sehingga pendekatannya yang dilakukan adalah berorientasi pada program (*program oriented*) bukan berorientasi pada ideology (*ideology oriented*).
4. Golkar adalah partai yang komitmen pada demokrasi. Demokrasi yang dibangun adalah "Demokrasi Pancasila", yakni demokrasi yang dilandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila. Golkar baru menjunjung

tinggi demokrasi dan kebebasan yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

5. Golkar adalah partai yang berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan antara lain dengan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh. Dengan sikap ini, Golkar mempertegas keberpihakannya kepada rakyat .
6. Golkar adalah partai yang komitmen pada penegakan hukum, keadilan dan hak-hak asasi manusia. Sebagai partai politik yang hidup dinegara yang berlandaskan hukum. Maka Golkar mengupayakan terwujudnya supremasi hukum disegala bidang. Komitmen pada penegakan hukum, keadilan, dan hak-hak asasi manusia ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan tata kehidupan negara yang demokratis, konstitusional, dan berdasarkan hukum.
7. Golkar adalah partai yang senantiasa mendasarkan gerak langkahnya pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama. Etika dan moralitas adalah saripati agama dan buah dari keberagaman itu sendiri. Dengan komitmen ini Golkar menempatkan keimanan dan ketakwaan sebagai salah satu asas pembangunan. Dalam persepsi yang demikian maka agama menempatkan kedudukan yang sangat penting karena agama memiliki fungsi motivasi, inspiratif, dan sublimatif.

#### d. Perspektif Masa Depan

Paradigma baru partai Golkar sebagaimana dikemukakan diatas, merupakan manifestasi komitmen dan kesungguhan Golkar baru untuk membangun Indonesia masa depan yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, mandiri, adil, terbuka, dan demokratis yang menjadi sendi-sendi penunjang terbangunnya masyarakat madani. Para pendiri negara (*founding father*) secara bijaksana merumuskan tujuan negara yang sekaligus merupakan cita-cita masa depan bangsa Indonesia.

Salah satu motivator reformasi adalah dorongan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan adalah nilai ilahi yang harus mutlak diwujudkan dalam masyarakat dan menjadi esensi dasar dari pembukaan UUD 1945 tersebut. Tatanan sistem sosial, politik, dan ekonomi harus berlandaskan nilai keadilan yang berintikan semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dan diganti dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati antar warga negara.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan yang hakiki yang merupakan nafas gerak reformasi. Atas dasar prinsip keterbukaan diciptakan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang transparan. Dengan struktur dan proses yang secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat madani tersebut terdapat keseimbangan antara efektifitas pengawasan sosial atas dasar pelaksana kebebasan asasi terutama kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan

berserikat disatu sisi, dan tanggung jawab asasi atas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pada sisi yang lain. Singkatnya Golkar baru mencita-citakan masyarakat yang maju dan sejahtera dalam satu tarikan nafas dengan masyarakat yang mandiri, demokratis, egaliter, dan terbuka dengan hal demikian Golkar mempunyai perspektif masa depan sebagai berikut :

#### 1. Tatanan Sosial Politik

Dukungan aktif dan kritis dari Golkar baru terhadap agenda reformasi adalah manifestasi dan komitmennya untuk menegakan tatanan kehidupan politik nasional yang demokratis, sekaligus melakukan rangkaian koreksi terencana, melembaga, dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi pada paradigma lama.

Atas dasar komitmen pada tatanan kehidupan politik yang demokratis dan egaliter tersebut, Golkar baru menyambut dengan tangan terbuka dengan tumbuhnya lembaga-lembaga politik dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Golkar baru memandang tumbuhnya berbagai wadah penyalur aspirasi masyarakat tersebut adalah hal yang positif dan wajar, namun harus diiringi dengan pencermatan apakah dalam jumlah yang banyak dan platform yang beraneka ragam tersebut akan memberikan sumbangan bagi kokohnya persatuan dan kesatuan (*integrasi*) bangsa, atau justru sebaliknya.

Berkenaan dengan peran TNI atau yang dikenal dengan konsep dwi fungsi, Golkar baru senantiasa meletakkannya dalam konteks dinamika

politik masyarakat yang terus berubah dan berkembang sangat dinamis. Adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Golkar dan TNI adalah mempunyai kaitan histories yang sangat dalam. Hal inilah yang menyebabkan Golkar dan TNI terdapat kesamaan pandang terhadap cita-cita dan masa depan bangsa dan negara. Namun dengan dikukuhkannya konsep konsep dasar kemandirian Golkar baru sesuai dengan hasil Munas luar biasa dimana Golkar baru tidak lagi mengenal struktur dan mekanisme tiga jalur, maka hubungan Golkar dan TNI disesuaikan dengan semangat dan dinamika reformasi. Dalam hubungan ini Golkar baru memberi dukungan atas langkah-langkah TNI melakukan reformasi internal. Golkar baru memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kebijakan TNI untuk melakukan reposisi mengurangi secara bertahap peran sosial politiknya, sehingga terbentuk sosok TNI dalam paradigma baru sejalan dengan semangat reformasi.

## 2. Tatanan Sosial Ekonomi

Dalam paradigma baru Golkar memandang bahwa untuk membangun tatanan social ekonomi masa depan adalah dengan pengembangan ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya dengan sistem ini yang menjamin rakyat akan semakin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi justru membawa negara dan bangsa Indonesia kedalam krisis ekonomi yang sangat parah. Dalam konteks ini maka ekonomi kerakyatan justru memiliki

potensi yang kuat untuk memperkukuh fundamental ekonomi bangsa Indonesia, karena dengan ekonomi kerakyatan maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan benar-benar dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dengan demikian Golkar baru bertekad untuk memperdayakan usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai prioritas yang paling diutamakan dalam membangun tatanan social ekonomi bangsa kedepan.

### 3. Tatanan Sosial Budaya

Dibidang sosial budaya, Golkar baru mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat (*strong nation*) yakni bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin social yang tangguh, dan memiliki etika yang kuat. Untuk itu perlu diupayakan berkembangnya budaya ilmu (*intelektualisme*), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius dikalangan masyarakat.

Golkar baru memandang keserasian sosial, keharmonisan sosial, dan kerukunan sosial sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan akan menjembatannya kesenjangan sosial ekonomi antar individu antar kelompok, antar kota-desa, antara Jawa dan luar Jawa, dan antar pusat dan daerah, serta terpeliharanya kerukunan hidup beragama, menjadi agenda penting yang harus diwujudkan.

Dengan konsep tatanan baru tersebut, partai Golkar bertekad untuk membangun masa depan, yaitu Indonesia yang dicita-citakan, Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

## 2. Tujuan, Fungsi, Hak, dan Kewajiban Partai

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang terpenting untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Yang tentunya sebagai badan yang mewakili kepentingan-kepentingan rakyat mempunyai tugas dan hak, sedangkan untuk kewajiban partai adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diatas, partai politik mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda nama gambar partainya dari departemen kehakiman sesuai dengan perundang-undangan.
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang pemilu.
- e. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan dilembaga perwakilan rakyat.
- f. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya dilembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pemberhentian anggotanya dilembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- h. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sedangkan untuk peraturan ditingkat internal partai-politik adalah ad/art setiap partai politik adalah wajib memilikinya.

### 3. Susunan dan Keanggotaan Pengurus DPD II Partai Golkar Kab. Indramayu

Susunan pengurus partai merupakan pencerminan seluruh keanggotaan partai didaerah yang mana keanggotaannya dipilih melalui mekanisme pemilihan sedangkan menurut ad/art bahwa musyawarah dan rapat partai terdiri dari :<sup>55</sup>

- a. Musyawarah Nasional
- b. Musyawarah Luar Biasa
- c. Rapat Pimpinan Paripurna
- d. Rapat Koordinasi Nasional
- e. Musyawarah Daerah I/II
- f. Musyawarah Kecamatan
- g. Musyawarah Kelurahan/Desa
- h. Rapat Kerja Tingkat Nasional
- i. Rapat Kerja Tingkat Daerah
- j. Rapat Kerja Tingkat Kecamatan
- k. Rapat Kerja Tingkat Kelurahan/Desa

Musyawarah Daerah sedikitnya sekali dalam lima tahun sekali dan berwenang menyusun :<sup>56</sup>

- a. Menyusun program kerja partai tingkat daerah
- b. Menilai pertanggung-jawaban dewan pimpinan daerah
- c. Memilih dewan pimpinan daerah
- d. Menetapkan keputusan-keputusan dalam batas wewenangnya

---

<sup>55</sup> *Ad/Art*, Partai Golkar Pasal. 23

<sup>56</sup> *Ibid*, pasal 23

Sebelum masa keanggotaannya yang selama lima tahun berakhir, anggota partai dapat berhenti karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan

Pengurus DPD II partai Golkar Kabupaten Indramayu untuk priode 2004-2009 dipilih lewat musyawarah daerah yang dilaksanakan pada Tanggal 8-10 Oktober 2004. Sebagaimana umumnya organisasi maka dibentuklah departemen-departemen yang dibawah oleh ketua umum yang merupakan alat penunjang organisasi agar lebih efektif guna menunjang kinerja partai adapun susunan departemen-departemen secara lengkap bisa dilihat dari table berikut ini :

Tabel 2.2  
Nama-nama Pengurus DPD II Partai Golkar Kab. Indramayu  
Priode 2004-2009

No	Nama	Jabatan
1.	H. Irianto MS. Syaifudin	Ketua
2.	H. Moh. Hasyim J, S.ag. M,ba	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Soekarno E Mm M,ba	Wakil Ketua
4.	Dedy Rachmatullah	Wakil Ketua
5.	H. Sudjana	Wakil Ketua
6.	H. Haryanto Hadi SH. SE	Wakil Ketua
7.	Drs. Daddy Tarsatiadi	Sekretaris
8.	Drs. A. Rozak Muslim	Wakil Sekretaris
9.	Hj. Cholida Dwiyantiningrum	Wakil sekretaris
10.	Mahfudin SH	Wakil Sekretaris
11.	Saefudin, BA	Wakil Sekretaris
12.	H. Hasan	Bendahara
13.	Ekawati Saidin	Wakil Bendahara
14.	Dra. Nurhayati Suyanto	Wakil Bendahara

15.	Drs. H. Suryaman, SP. SE	Bag. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
16.	Drs. Sugianto	Bag. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
17.	Pung Purnama Bsf	Bag. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
18.	Drs. H. Suparta Patuwijaya	Bag. Pemenangan Pemilu dan Media Massa
19.	Round Indra Pribadi	Bag. Pemenangan Pemilu dan Media Massa
20.	Susendi Restu	Bag. Pemenangan Pemilu dan Media Massa
21.	KH. Amirrudin	Bag. Kerohanian
22.	Achmad Nasirruzaman	Bag. Kerohanian
23.	Ny. Ida Winarsih Edi Jubaedi	Bag. Kerohanian
24.	Drs. Nono Darsono	Bag. Pengabdian Masyarakat
25.	Ronita SE	Bag. Pengabdian Masyarakat
26.	Drs. Kusbandi	Bag. Pengabdian Masyarakat
27.	Suyatno Ismail	Bag. Seni dan Budaya
28.	Edi Bhentar	Bag. Seni dan Budaya
29.	H. Kianom Rusdi	Bag. Seni dan Budaya
30.	Ny. Hj. Nani Ratnaningsih	Bag. Pemberdayaan Perempuan
31.	Ny. Hj. Dari Poerwati. S	Bag. Pemberdayaan Perempuan
32.	Hj. Aisyah Sumiyar	Bag. Pemberdayaan Perempuan
33.	Moh. Satori	Bag. Pemuda dan Olah raga
34.	Rochman, Bsc	Bag. Pemuda dan Olah raga
35.	Toto Kuryanto, S.ag. M.Hum	Bag. Pemuda dan Olah Raga
36.	Drs. H. Satori Thomas	Bag. Koperasi, UKM dan Kewirausahaan
37.	Mulyadi Cahya	Bag. Koperasi, UKM dan Kewirausahaan
38.	H. Supriyadi	Bag. Koperasi, UKM dan Kewirausahaan
39.	H. Sofwan Hidayat	Bag. Pemberdayaan Tani dan Nelayan
40.	Deni Raskum	Bag. Pemberdayaan Tani dan Nelayan
41.	Hais Lasimpala	Bag. Pemberdayaan Tani dan Nelayan
42.	H. Djaja Sudjana, SH	Bag. Perundang-undangan, Hukum dan HAM
43.	Khalimi, SH	Bag. Perundang-undangan, Hukum dan HAM
44.	Ahmad Rochjana	Bag. Perundang-undangan, Hukum dan HAM

Sumber : DPD II Partai Golkar Kabupaten Indramayu

#### 4. Program dan Kegiatan Partai Golkar

Pokok-pokok program umum partai Golkar merupakan pokok-pokok kebijakan partai dalam mencermati dan menyikapi krisis dewasa ini serta arus reformasi dalam berbagai bidang kehidupan nasional dan perkembangan lingkungan strategis yang bersifat nasional, regional, dan global.

Krisis yang tengah melanda Indonesia, berawal dari krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi, politik, dan hukum yang pada hakikatnya bersumber dari krisis kepercayaan, moral, dan etika dengan segala dampaknya perlu segera diatasi dengan langkah-langkah penanggulangannya agar kehidupan masyarakat dapat pulih kembali dalam waktu yang relative singkat.

Partai Golkar melihat sepenuhnya bahwa saat ini bangsa Indonesia telah berada pada suatu era globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang menghendaki adanya kesiapan dan kemampuan menghadapi persaingan yang semakin ketat dimana arus informasi dan komunikasi akan mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan segala implikasi positif dan negatifnya.

Partai Golkar dituntut untuk melaksanakan reformasi secara konstitusional, konseptual, bersifat terbuka dan dinamis, berorientasi kerakyatan dan berpijak pada kesinambungan dari hasil-hasil positif partai Golkar saat ini. Sedangkan ruang lingkup pokok-pokok program umum meliputi Panca Sukses yaitu :

- a. Sukses Konsolidasi
- b. Sukses Penanggulangan Krisis dan Pemulihan
- c. Sukses Agenda Reformasi
- d. Sukses Pembangunan Nasional

Dalam melaksanakan pokok-pokok program umum, partai Golkar senantiasa berpegang teguh pada sikap dasarnya yaitu :

1. Mempertahankan tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan senantiasa berpegang teguh pada asas kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, demokrasi dan hukum.
2. Mempelopori penyamaan visi dan makna substansi reformasi, agar reformasi berjalan secara konstitusional, tertib dan damai. Orde reformasi adalah suatu sikap mental dan tatanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang secara total berpedoman pada asas kedaulatan rakyat, nilai moral etika, keadilan, dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Orde reformasi bersifat terbuka dan dinamis, berorientasi pada kerakyatan, bercirikan transparansi, akuntabilitas dan integritas, bersih dari segala bentuk monopoli, monopsoni, kartel, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan untuk melihat prioritas program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3  
Kebijakan Program Prioritas Partai Golkar

No.	Bidang	Pokok Program
1.	Pemenangan Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sukses konsolidasi organisasi sebagai bagian dari renstra pemenangan pemilu 1999 antara lain melalui musda-musda, penyegaran kader, apel akbar, dll.</li> <li>2. Penggalangan yang bertumpu pada territorial desa dengan membentuk kelompok kader desa yang</li> </ol>

		<p>didukung dengan penggalangan fungsional dan penggalangan umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembentukan Bappilu dan penugasan kader Golkar di dalam kelembagaan pemilu yang dibentuk oleh pemerintah.</li> <li>4. Penyikapan melaksanakan kampanye dengan kegiatan penyusunan tema dan sub tema kampanye penciptaan opini, counter issue-issue aktual dan penataran jurkam serta penyusunan management kampanye.</li> <li>5. Memantau pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pada hari "H" pemilu.</li> </ol>
2	Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan kelembagaan</li> <li>2. Melakukan penyegaran kader pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan kader.</li> <li>3. Melakukan pembaharuan data kader/keanggotaan serta pembiayaan anggota.</li> <li>4. Pembentukan pos pelayanan rakyat</li> </ol>
3.	Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan konsolidasi terhadap organisasi wanita yang menyalurkan aspirasinya kepada Golongan Karya.</li> <li>2. Melakukan program simpati terutama pada daerah pedesaan.</li> <li>3. Melaksanakan rembug wanita terutama dalam rangka pemberdayaan peran wanita.</li> <li>4. Optimalisasi peran wanita dalam menghadapi krisis dan sukses reformasi.</li> </ol>
4.	Pemuda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi peran dan peranan Pemuda/pemudi Golongan Karya.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan dialog, usul, dan aksi.</li> <li>3. Melaksanakan bakti peduli</li> <li>4. Pemuda Golongan Karya.</li> </ol>
5.	Seni dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan konsolidasi anggota dan kelembagaan seni budaya.</li> <li>2. Pelaksanaan program simpati melalui kegiatan seni budaya.</li> <li>3. Mengembangkan seni budaya lokal/tradisional.</li> </ol>
6.	Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan dan bantuan sosial dalam rangka membantu krisis pangan masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan bantuan kesehatan.</li> <li>3. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan masyarakat.</li> <li>4. Pendayagunaan pos pelayanan rakyat</li> </ol>
7.	Cendekiawan Iptek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan Pendayagunaan tim kerja iptek.</li> <li>2. Pembentukan dan pendayagunaan tim kerja iptek.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan yang mendukung berkembangnya sumber daya masyarakat madani.</li> </ol>
8.	Tani dan Nelayan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan pemanfaatan satuan tugas tani dan nelayan</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penggalangan tani dan nelayan.</li> <li>3. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada petani dan nelayan.</li> </ol>
9.	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi peran tim kerja ketanagakerjaan.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan dukungan terhadap program jaringan pengaman sosial (<i>social safety net</i>).</li> <li>3. Mengembangkan kegiatan yang mendukung berkembangnya iklim kehidupan beragama yang</li> </ol>